

NO. 1440/KOM-D/SD-S1/2013

**STRATEGI HUMAS BKKBN DALAM
MENOSIASIKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
DI PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



OLEH :
HARRY GUNAWAN
10743000053

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

STRATEGI HUMAS BKKBN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI RIAU

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau pada bagian Humas dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau.

Metode yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif terhadap data yang penulis dapatkan yaitu pengumpulan data berdasarkan kenyataan dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisa dan menginterpretasikan arti data yang dimaksud. Data Primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan Subbagian Umum dan Humas, dan Subbidang Advokasi dan KIE. Sedangkan data Sekunder adalah buku-buku reverensi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Subjek dalam penelitian ini adalah bagian Bidang Humas dan bagian Bidang Advokasi dan KIE BKKBN Provinsi Riau, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini berjumlah Lima orang, empat orang dari Bidang Humas dan satu orang dari Bidang Advokasi dan KIE.

Dari hasil penelitian, secara umum dapat disimpulkan bahwa Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana tidak bekerja dengan sendirinya, humas memerlukan peran komunikator baik dari pihak internal maupun eksternal agar mempermudah dalam proses mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau, selain itu humas juga bekerja sama dengan pihak media massa, baik media cetak maupun media elektronik agar sosialisasi program keluarga berencana tersebar secara merata ke seluruh masyarakat Provinsi Riau. Dari hasil observasi penulis dapatkan di lokasi penelitian, humas dan beserta anggota BKKBN lainnya sering mengadakan rapat internal dan mengadakan pertemuan kepada komunikator non-formal untuk meningkatkan kualitas daripada komunikator formal dan non-formal dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau. BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung kelancaran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana dan ada juga yang menjadi faktor penghambat Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi.

Amin Ya Robbal Alamin.

Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dimana beliaulah yang membawa umatnya kejalan yang benar. Kemudia penulis ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazir Karim, MA. Selaku Rektor UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr Yasril Yazid, MIS Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. Nurdin Abdul Halim, MA selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Penasehat Akademik Penulis.
4. Bapak Elfiandri, M. Si dan Ibu Aslati, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Komunikasi.

6. Ayahanda Gunawan, Ibunda Ridarnis Rony dan adik-adik penulis tercinta Hendro Gunawan, Haryo Gunawan, M. Heryan Gunawan, Leoga Zaldan Arwi yang telah memberikan motivasi baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk yang tersayang Oktha Diningrum, yang selalu mendampingi, memberikan motivasi selama penulis mengerjakan skripsi.
8. Terima kasih bapak ojek yang dah nemuin skripsi penulis yang tercecer di jalan.
9. Teman-teman Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2007 Esy Afrianti S.I.kom, Saima Rindala Bayu S.I.kom, Basrianto S.I.kom, Fahruddin S.I.kom dan Semua teman-teman PR A angkatan 07,
10. Terima Kasih untuk sahabat karib penulis Agus Heryanto S.I.kom, Ibnu Mutahir S.I.kom, Hendriman S.I.kom, Erlizar, S.I.kom, akhirnya aku wisuda juga jank!!!!
11. Terima Kasih untuk kepala suku Abd Rohim calon S.I.kom beserta panglima nya Danang Sanjaya calon S.I.kom, T. M. Fadli calon S.I.kom, apa lageee,, kerja kan lah skripsi tuuu, SEMANGAT!!!
12. untuk Para Penggemar penulis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Terima kasih untuk teman teman penulis yang nama nya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Seluruh Keluarga Besar Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala amal jariah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'alamin.*

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

Harry Gunawan

NIM. 10743000053

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Penegasan Istilah	5
D. Permasalahan	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional	9
H. Metode Penelitian	21
I. Teknik Analisis Data	23
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau	25
B. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Riau	26
C. Tugas Pokok dan Kewenangan BKKBN Provinsi Riau..	27
D. Fungsi BKKBN Provinsi Riau	27
E. Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau	29
F. Susunan Organisasi BKKBN Provinsi Riau	29
BAB III : PENYAJIAN DATA	
A. Strategi Humas BKKBN Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau	37
BAB IV : ANALISIS DATA	
A. Strategi Humas BKKBN Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau	47

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Humas merupakan bagian terpenting yang diperlukan oleh setiap perusahaan, organisasi, bahkan instansi pemerintah, baik yang bersifat komersil maupun non komersil. Apalagi perusahaan yang berskala besar sangat memerlukan *Public Relations* untuk meningkatkan atau memajukan sebuah perusahaan atau instansi. Artinya : Humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dan “*banjir informasi*” seperti saat ini. (M. Linggar, 2005: 1).

Humas pemerintah berbeda dengan humas non pemerintah pada humas pemerintah tidak mempunyai sesuatu yang diperjual belikan, kendati demikian humas pemerintah juga senantiasa menggunakan teknik publisitas dalam mensosialisasikan kegiatan pemerintah. Humas pemerintah bertanggung jawab dalam mensosialisasikan yang menyangkut kepentingan masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan merespon segala bentuk kegiatan serta program yang direncanakan oleh pemerintah (Widjaja, 1992 : 31).

Strategi komunikasi organisasi di dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintah memang sangat diperlukan. Mengingat berhasil atau tidaknya komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh strategi komunikasi (Onong, 2003 :32). Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, setiap perusahaan atau instansi pemerintah pasti memerlukan strategi komunikasi yang baik, apalagi

dengan kemajemukan masyarakat yang ada, seorang humas profesional harus mampu membuat strategi-strategi yang baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan strategi adalah cara yang sangat fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan berbagai sasarnya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti dihadapi (Sondang, 1995 : 21)

Selanjutnya di dalam buku Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama sebuah perusahaan atau instansi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan (Jauch dan William, 1988 : 12).

Komunikasi merupakan adanya interaksi antara satu orang dengan orang lain atau dengan kata lain terjadinya interaksi antara sumber pemberi pesan dengan penerima pesan sehingga terjadi pemahaman atas pesan yang disampaikan. Jadi, komunikasi adalah penyampaian pesan yang dapat dimengerti oleh sumber pemberi pesan dengan penerima pesan sehingga perjadi pemahaman atas pesan yang disampaikan (Deddy, 1999 :1)

Proses penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya dengan menggunakan strategi komunikasi yang baik dan efektif, agar tercapai suatu tujuan yang maksimal. Penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya tidak terlepas dari humas yang memiliki peranan untuk menyampaikan informasi kepada

masyarakat, dan menjelaskan lebih mendalam tentang program yang telah direncanakan agar berjalan dengan lancar.

Humas adalah fungsi manajemen dengan tugas melakukan penelitian terhadap pendapat, keinginan dan sikap publik, melakukan usaha penerangan dan hubungan untuk mencapai saling pengertian, kepercayaan hubungan integrasi dengan publik. Penegasan kegiatan humas menurut Cultip dan Center (Onong, 1992 : 36), dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;
2. Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik, baik *public ekstern* maupun *public intern*;
3. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarluaskan informasi dari organisasi kepada publik dan menyebarluaskan opini publik kepada organisasi;
4. Melayani publik dan menasehati pimpinan demi kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, humas BKKBN Provinsi Riau memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi program keluarga berencana dan sekaligus sebagai wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan kepada BKKBN Provinsi Riau, sehingga terjadi hubungan komunikasi timbal balik (*two ways communication*) antara BKKBN dengan masyarakat untuk saling pengertian.

Dalam proses mensosialisasikan program keluarga berencana kepada masyarakat yang dilakukan oleh humas BKKBN, bukanlah semata-mata hanya sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi lebih dari itu, humas

BKKBN harus lebih gencar mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif sebagai langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar dapat perpartisipasi dalam program keluarga berencana.

Dengan demikian, strategi komunikasi baik secara makro (*planned multimedia strategi*) maupun secara mikro (*single communication medium strategi*) mempunyai fungsi ganda (Onong, 1992 : 28) :

1. Menyebarluaskan pesan kumunikasi yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani “kesenjangan budaya” (*cultural gap*) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasikannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Untuk itu, Humas BKKBN Rovinsi Riau harus berperan aktif dalam mensosialisasikan segala bentuk program Keluarga Berencana agar masyarakat mendapatkan pengertian tentang program Keluarga Berencana, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh BKKBN. Maka dari itu jelaslah bahwa keberhasilan dari program KB tidak lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek dalam program KB.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul :

**“Strategi Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan
program Keluarga Berencana di Provinsi Riau”**

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis memilih judul diatas, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Masalah tersebut sangat menarik dan perlu diteliti, karena pada era sekarang ini Program KB sedang di prioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Riau.
2. Penulis merasa mampu untuk menelitiya baik dari segi waktu, tempat, tenaga dan dana.
3. Masalah ini erat kaitanya dengan jurusan dimana penulis berstudi.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Strategi merupakan cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala yang dihadapi (Sondang, 1995 : 21). Namun strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) yang harus dicapai dalam mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat Provinsi Riau.

2. Humas atau *Public Relations* menurut kamus *Fund and wagnal,American Standard Desk Dictionary* terbitan 1994, istilah Humas diartikan sebagai segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan oleh organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan sepakterjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan bahwa Humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan tujuan *Management by Objectives* (Linggar : 3 : 2008). Humas yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebagai mediator antara Organisasi dengan publik untuk mencapai tujuan bersama.
3. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berada dibawah dan beratanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).
4. Sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga men-jadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (pusatbahasa.diknas.go.id). Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan suatu informasi tentang sesuatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh

masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampai pesan dan penerima pesan (widjaja, 1992 : 31). Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyampaian dan mempengaruhi, agar masyarakat melaksanakan dan ikut serta mewujudkan program KB.

5. Program KB merupakan Program Pemerintah khususnya BKKBN yang bertujuan mengurangi tingkat kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah masalah-masalah yang dapat di lihat pada objek dan subjek penelitian yang kemudian dirumuskan. Maka dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut :

- a. Bagaimana strategi Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program keluarga berencana di Provinsi Riau ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana ?
- c. Media apa saja yang digunakan Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana ?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan penulis membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Strategi Humas BKKBN Provinsi Riau

dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau.

3. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana strategi humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga berencana di Provinsi Riau.
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung Humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada masyarakat Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada masyarakat Provinsi Riau.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Akademis

- a. Sebagai bahan masukan bagi para pengkaji ilmu komunikasi di bidang *Public Relations* yang berminat untuk meneliti masalah yang sama.
- b. Sebagai langkah awal bagi peneliti untuk dapat menegmbangkan teori-teori yang didapat selama ini dan menambah khazanah Ilmu Komunikasi khususnya tentang kehumasan.

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai masukan dan bahan informasi bagi humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana kepada masyarakat Provinsi Riau.
- b. Bagi peneliti diharapkan dapat memberikan pengalaman dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama mengikuti perkuliahan.
- c. Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S.1) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

G. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian, teori berperan sebagai landasan berfikir untuk mendorong pemecahan suatu permasalahan dengan jelas dan sistematis. Hal ini sangat berkaitan dengan pengertian teori yakni serangkaian asumsi, konsep,

definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan antar konsep. Setiap penelitian memerlukan kerjasama titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah, untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti (Nawawi, 1993 :39-40)

a. Strategi Humas

Jika membicarakan strategi dalam penyampaian informasi tidak lepas dari fungsi humas dalam melaksanakan kerjanya. Dalam hal ini diperlukan seorang pimpinan humas yang dapat mengatur strategi dan mempunyai kredibilitas melaksanakan fungsi-fungsi sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya (Onong, 2003 : 32).

Strategi adalah langkah yang sangat signifikan bagi suatu organisasi atau lembaga dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga maupun karyawan itu sendiri. Untuk itu strategi secara umum adalah untuk menghindari atau mengantisipasi segala bentuk kegagalan yang akan terjadi dengan memperhatikan kemungkinan tersebut maka membutuhkan segenap pengelolaan secara profesional (Rusady, 1997 : 84).

Istilah strategi humas sering disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang suatu perusahaan atau organisasi. Menurut Cutlip dan Center (dalam

Kasali dan Abdurachman) proses humas sepenuhnya mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses ini terdiri dari : *Fact Finding, Planning, Communication, dan Evaluations* (Abdurachman, 2001 : 31). Kasali mangadaptasinya menjadi : Pengumpulan fakta, Defenisi permasalahan, Perencanaan dan Program, Aksi dan Komunikasi, serta Evaluasi (Kasali, 1984 : 33).

Menurut Ahmad S. Adnan Rutra, pengertian tentang strategi humas atau *public relations* adalah “ alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan dalam rangka suatu rencana humas (Ruslan, 2003 : 110).

Fungsi pendekatan public relations mempunyai strategi diantaranya adalah (Rosady, 2005 : 133-134).

1. Strategi operasional melalui pelaksanaan *public relations* yang digunakan dengan pendekatan kemasyarakatan, melalui mekanisme dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat diberbagai media. Artinya pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar mengenai aspirasi yang ada didalam masyarakat, baik mengenai etika, moral, maupun nilai-nilai yang dianut didalam masyarakat.
2. Pendekatan persuasif dan edukatif, fungsi humas adalah menciptakan komunikasi dua arah (timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, toleransi dan sebagainya.

3. Pendekatan tanggung jawab sosial, humas menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.
4. Pendekatan kerja sama, berupaya berhubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan baik hubungan kedalam maupun hubungan keluar untuk meningkatkan kerjasama.
5. Pendekatan koordinatif, untuk memperluas peranan humas dimasyarakat.

Perencanaan strategi dalam humas merupakan perbuatan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, mengidentifikasi publik kunci, menentukan kebijakan atau aturan untuk memadukan pemilihan strategi, dan menentukan strategi. Harus ada kaitan antara tujuan program keseluruhan, sasaran yang ditentukan untuk masing-masing publik dan strategi yang dipilih. Poin utamanya adalah bahwa strategi yang dipilih untuk mencapai hasil tertentu.

Praktisi humas bekerjasama dengan manager untuk mengembangkan rencana program strategi. Proses perencanaan dan pemograman biasanya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Mengidentifikasi peran dan misi.* Menentukan sifat dan cakupan kerja yang akan dilakukan.
2. *Menentukan area hasil utama.* Menentukan dimana tempat meninvestasikan waktu, energi dan bakat.
3. *Memilih dan menentukan sasaran.* Menentukan hasil yang dicapai.

4. *Menyiapkan rencana aksi.* Menentukan bagaimana mencapai sasaran spesifik.

Keberadaan humas pada suatu lembaga merupakan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat ataupun kepada anggota itu sendiri. Dalam mengatur strategi menjalankan fungsi kepada masyarakat ataupun kepada perusahaan secara tidak langsung dapat meningkatkan, mengembangkan lembaga itu sendiri.

Menurut Edward L. Bernays menyatakan bahwa humas memiliki dua fungsi utama, yaitu (Rosady, 2003 : 191) :

1. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perubahan masyarakat secara langsung.
2. Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Sebagai landasan perencanaan dan program kerja manajemen strategi humas secara garis besar memenuhi faktor-faktor sebagai berikut (Rosady, 1999 : 121) :

1. Melakukan atau merencanakan sesuatu SWOT, yaitu untuk memprediksi sejauh mana sumber-sumber kekuatan atau kemampuan dan posisi kelemahan dilihat dari segi internalnya. Kemudian sejauh mana pengevaluasian mengenai kesempatan atau peluang yang ada dan bahkan berupa ancaman yang datang dari eksternalnya.
2. Mengevaluasi mengenai perencanaan, pengorganisasian, koordinasi pelaksanaan, pengkomunikasian dan pencapaian tujuan yang diharapkan

dimasa-masa mendatang khususnya, dan mencapai tujuan bersama yang terintegrasi dengan tujuan organisasi atau lembaga pada umumnya.

3. Melaksanakan manajemen dan aktifitas humas berdasarkan pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi, dan pengevaluasian.

b. Humas

Humas sesungguhnya sebagai alat manajemen modern, secara struktural merupakan bagian integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya humas bukanlah merupakan fungsi terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi tersebut, alias bersifat melekat pada manajemen perusahaan. Hal tersebut menjadikan humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya visi misi dan tujuan bersama dari organisasi atau perusahaan tersebut (Rosady, 2005 : 24)

Menurut W. Platles dalam (William dan Jansen, 2003 : 257) humas adalah tanggung jawab dan fungsi manajemen untuk menganalisa kepentingan publik, mengidentifikasi dan manfaatkan berbagai kebijakan dan program kerja dari berbagai organisasi, serta melaksanakan serangkaian program tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan pada niat baik.

Peranan umum humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktifitas pokok kehumasan yaitu (Rosady, 2005 : 23) :

1. Mengevaluasi sikap atau opini publik
2. Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi atau perusahaan dengan kepentingan publiknya.

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan aktifitas humas.

Pelaksanaan Strategi PR dalam berkomunikasi Menurut Cutlip, Center dan Brom, yang dikenal dengan istilah “7-Cs PR” adalah sebagai berikut (Rosady, 2008 : 122-123) :

1. *Credibility (Kredibilitas)*

Komunikasi dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani publiknya yang memiliki keyakinan dan rasa hormat.

2. *Konteks*

Menyangkut suatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup social, pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif.

3. *Content*

kepentingan orang banyak atau public sehingga informasi dapat diterima sebagai suatu yang bermanfaat.

4. *Clarity (Kejelasan)*

Pesan harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti serta memiliki pemahaman yang sama.

5. *Continuity and Consistency (Berkelanjutan dan Konsistensi)*

Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir, komunikasi harus dilakukan berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan.

6. *Channel (Saluran)*

Mempergunakan saluran media informal yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai sasaran.

7. *Capability of the audience (Kapabilitas Khalayak)*

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki khalayak. Komunikasi dapat menjadi efektif bagi masyarakat apabila berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat seperti peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan kemampuan.

Jadi jelas humas merupakan suatu landasan dalam organisasi yang difungsikan untuk memajukan sebuah organisasi baik intern maupun eksternsesuai dengan tujuan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan humas inilah suatu organisasi bisa memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan ataupun kepada khalayak, juga untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan atau instansi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga tentunya dengan Humas BKKBN Provinsi Riau.

Hal ini sesuai dengan fungsi dari humas untuk memberikan kepercayaan kepada publik. Untuk memberikan informasi kepada khalayak, seorang humas mempunyai komunikasi yang efektif atau harus mengetahui unsur-unsur komunikasi, maka dengan demikian secara tidak langsung mampu mempengaruhi khalayak sehingga mereka percaya dan melaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dari humas tersebut.

Dengan komunikasi efektif dan adanya unsur-unsur komunikasi maka seorang humas dapat dengan mudah baik dalam segi waktu, ekonomi dan kecepatan dalam menyampaikan informasinya dan penyampaian tujuannya, maka peranan komunikasi pada humas dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting untuk memajukan organisasi tersebut. Sependapat dengan yang dikatakan Sean Fan dan Keys dalam (Moekijat, 1993 : 14) yang mengatakan komunikasi mempunyai peranan penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerjasama dan mengkoordinasikan usaha-usaha mereka untuk mencapai sebuah tujuan.

c. Keluarga Berencana

Menurut Undang-undang no 10/1992, Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia sejahtera. Sedangkan menurut WHO, Program Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu / pasutri untuk Mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur *interval* diantara kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga(<http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>).

Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekutan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah: Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

Tujuan KB meliputi:

1. Keluarga dengan anak ideal
2. Keluarga sehat
3. Keluarga berpendidikan
4. Keluarga sejahtera
5. Keluarga berketahtanah
6. Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya
7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS)

Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana antara lain :

1. Kesehatan reproduksi remaja;
2. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
3. Penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
4. Keserasian kebijakan kependudukan;
5. Pengelolaan SDM aparatur;
6. Penyelenggaran pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan;
7. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

Program Keluarga berencana memberikan dampak, yaitu :

1. Penurunan angka kematian ibu dan anak;
2. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
3. Pengingkatan kesejahteraan keluarga;
4. Pengingkatan derajat keluarga;
5. Peningkatan mutu dan layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM.

2. Konsep Operasional

Humas memiliki peranan dan fungsi sebagai penghubung atau mediator dalam sebuah organisasi atau lembaga yang diwakili untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi atau lembaga dengan masyarakatnya dalam upaya menciptakan citra yang baik bagi suatu organisasi. Karena tanpa adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat maka segala program dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi tidak dapat berjalan dengan lancar.

Humas BKKBN Pekanbaru harus gencar mensosialisasikan Program KB kepada masyarakat dan juga sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritikan kepada BKKBN, dalam upaya mensukseskan Program KB tersebut. Keberhasilan suatu kegiatan tergantung pada peran serta dan dukungan dari masyarakat.

Untuk itu penulis menetapkan indikator-indikator sebagai berikut :

a. Indikator Strategi Humas BKKBN

1. Komunikator

a) Formal

- 1) Kepala dan seluruh staf humas BKKBN
- 2) Petugas lapangan keluarga berencana
- 3) Penyuluhan keluarga berencana terampil
- 4) Penyuluhan keluarga berencana ahli

b) Nonformal

- 1) Tokoh agama
- 2) Tokoh adat
- 3) Pelajar dan Mahasiswa
- 4) Kalangan media
- 5) Ikatan dokter Indonesia dan Ikatan bidan Indonesia

2. Pesan

a) Kesehatan Reproduksi Remaja

b) Keluarga Berencana

3. Media

a) Media Langsung : Penyuluhan dan seminar

b) Media massa

- 1) Media cetak : Koran dan majalah

- 2) Media elektronik : televisi dan radio

c) Media Non Massa : Baliho, spanduk, brosur, pamflet

4. Komunikasi (sasaran)

- a) Remaja dan Dewasa
- b) Pasangan Usia Subur

5. Feedback

Tanggapan dari masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi program KB agar BKKBN dapat mengakomodasikannya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, tepatnya pada bagian Humas.

2. Subjek dan Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah bagian Humas BKKBN Provinsi Riau yang berjumlah empat orang dan Bagian Advokasi dan KIE BKKBN Provinsi Riau yang berjumlah satu orang. Sedangkan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah Strategi humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program keluarga berencana di provinsi Riau.

3. Sumber data

- a. Sumber Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dokumentasi. Dalam penelitian ini sebagai informan adalah Humas BKKBN Provinsi Riau (Subagyo, 1991 : 87).

b. Sumber Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Rosady, 2003 : 132) sebagai data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan Solialisasi Program KB di Provinsi Riau.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara (Burhan Bungin, 2007 : 108).
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian atau realitas yang diteliti, baik berupa perilaku, keadaan, benda, maupun simbol-simbol tertentu (Hidayat, 2010 : 130).
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini (Suharsimi Arikunto, 2006 : 151-158).

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau kalimat-

kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Data yang dianalisis yaitu mengenai strategi humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program keluarga berencana di Provinsi Riau.

Deskriptif diartikan melukiskan variabel, satu demi satu. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2005 : 25).

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain(Moleong, 2007 : 248).

I. Sistematika penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi bab dalam lima bahasan, dimana masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran umum BKKBN Provinsi Riau.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan tentang pembahasan masalah :

Bagaimana strategi humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau.

BAB IV : ANALISIS DATA

Menganalisa data yang telah disajikan pada bab III yang berisi tentang analisa terhadap pelaksanaan Strategi Humas BKKBN Provinsi Riau.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran, kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi Riau

Perluasan dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional secara terarah dan terkoordinasi di Provinsi Riau dimulai pada awal Pelita III, yaitu pada era Keppres No. 38 tahun 1978. Pada saat itu telah terbentuk lembaga BKKBN Propinsi Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan, penilaian, pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan program KB Provinsi Riau (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

Pada awal pelaksanaan program KB di Provinsi Riau, perluasan dan pengembangan pelaksanaan kegiatan KB secara terprogram dan terkoordinasi baru dilaksanakan pada tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, Bengkalis dan Indragiri Hilir. Pada ketiga daerah tersebut telah dibentuk lembaga BKKBN kabupaten untuk mengkoordinasikan perencanaan, penilaian, dan pengawasan pelaksanaan program KB di wilayah tersebut dengan dukungan sepenuhnya pemerintah daerah setempat. Sedangkan pada daerah Tingkat II lainnya, pelaksanaan kegiatan KB dilapangan langsung dibawah koordinasi BKKBN Provinsi dengan Pengawasan Petugas Lapangan KB (PPLKB) sebagai ujung tombak pelaksanaan koordinasi ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab langsung kepada BKKBN Provinsi (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

Setelah berjalan lebih kurang dua tahun, pelaksanaan kegiatan KB di Provinsi Riau, khususnya di tiga Kabupaten tersebut diatas telah makin berkembang dan meluas serta telah berhasil mengajak sebagian masyarakat untuk ber-KB. Dengan melihat perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan KB selama dua tahun berjalan tersebut, pada era Keppres No. 64 tahun 1983 pelaksanaan program KB secara terarah dan terkoordinasi mulai diperluas keseluruh daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Riau yang ditandai dengan pembentukan lembaga BKKBN Kabupaten/Kotamadya diluar tiga Kabupaten tersebut diatas (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

Mulai saat itu, pelaksanaan program KB Nasional di Provinsi Riau semakin meluas dan berkembang. Partisipasi masyarakat semakin meningkat dari tahun-ketahun, dukungan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten semakin kuat dan besar. Demikian pula dukungan dan peran aktif unit pelaksanaan Program KB, baik instansi Pemerintah, maupun swasta dan organisasi masyarakat makin meningkat dan semakin nyata (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

B. Visi dan Misi BKKBN Provinsi Riau

Visi BKKBN Provinsi Riau adalah penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. Misi BKKBN Provinsi Riau adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

C. Tugas Pokok dan Kewenangan BKKBN Provinsi Riau

Tugas pokok BKKBN Provinsi Riau adalah melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011).

Kewenangan BKKBN Provinsi Riau adalah sebagai berikut (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011) :

1. Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
4. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
 - b. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

D. Fungsi BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Pasal 3, BKKBN menyelenggarakan fungsi (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011) :

1. Perumusan kebijakan Nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
6. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
7. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
8. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN.
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.
11. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

E. Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau

Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau adalah (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011) :

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB.
2. Menata kembali pengelolaan Program KB.
3. Memperkuat SDM operasional Program KB.
4. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB.
5. Meningkatkan pembiayaan Program KB.

F. Susunan organisasi BKKBN Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 pasal 4, BKKBN Provinsi Riau terdiri atas (Dokumen BKKBN Provinsi Riau, 2011) :

1. Kepala

Kepala adalah pemimpin BKKBN. Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. sekretariat utama dipimpin oleh sekretaris utama.

Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan BKKBN.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat utama menyelenggara-kan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan dukungan masyarakat.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKKBN.

3. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk

Deputi bidang pengendalian penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. bidang pengendalian penduduk meliputi pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan kebijakan, dan analisis dampak mengenai kependudukan serta kerjasama pendidikan kependudukan.

Deputi bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh deputi. Deputi bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk.

4. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dipimpin oleh deputi. Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

5. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga meliputi upaya pemberian akses informasi, konseling, pembinaan, bimbingan, dan pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan ketahanan keluarga.

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

6. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BKKBN.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi dipimpin oleh Deputi. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Advokasi, Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- b. Pelaksanaan teknis dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

7. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Dalam melaksakan tugasnya, deputi bidang pelatihan, penelitian, dan pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

8. Inspektorat utama

Inspektorat utama adalah unsur pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. inspektorat utama dipimpin oleh inspektur utama. Inspektorat utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.

Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat utama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BKKBN.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BKKBN.
- d. Penyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN.
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat utama.

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Strategi Humas BKKBN dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Propinsi Riau

1. Komunikator

Menurut Humas BKKBN Propinsi Riau **Dra. Ning Iriani Indarwati**, dalam wawancara pada tanggal 4 januari 2012, mengatakan bahwa dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana seorang humas tidak dapat bekerja dengan sendirinya, peran pihak indern BKKBN dan pihak ekstern juga sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana tersebut. Pihak intern dan pihak ekstern tersebut adalah (wawancara : Dra. Ning Iriani Indarwati, KaSubBag Umum dan Humas, 4 januari 2012) :

a) Komunikator Formal

- 1) Kepala dan seluruh staf BKKBN
- 2) Petugas Lapangan Keluarga Berencana

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), adalah petugas Keluarga Berencana di lapangan yang berbasis pendidikan awal SMP, umumnya yang berkategori ini adalah mereka yang diangkat pada masa awal program KB di Indonesia (sekitar tahun 1970 – 1980-an).

3) Penyuluhan Keluarga Berencana Terampil (PKB Terampil)

Penyuluhan Keluarga Berencana Terampil (PKB Terampil), adalah petugas keluarga berencana di lapangan yang berbasis pendidikan awal SMA sampai D-III (diploma III).

4) Penyuluhan Keluarga Berencana Ahli (PKB Ahli)

Penyuluhan Keluarga Berencana Ahli (PKB Ahli), adalah petugas keluarga berencana di lapangan atau desa yang berbasis pendidikan awal dari Sarjana S-I (strata satu).

Ketiga jenis kategori di atas dalam prakteknya sulit dibedakan, karena mereka sama-sama bertugas membina masyarakat sekaligus sebagai konselor bidang KB di wilayah desa binaannya masing-masing, serta semuanya sama-sama berkantor di Balai Desa.

b) Komunikator Non Formal

1) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Dalam mensosialisasikan program KB, tokoh agama berperan sebagai komunikator yang lebih menjelaskan tentang manfaat ber-KB dari segi agama. BKKBN bekerja sama dengan KUA, untuk menjelaskan program KB dan memberikan nasehat kepada masyarakat yang baru akan menikah.

“Para tokoh agama dan tokoh masyarakat di samping berperan sebagai penggerak masyarakat di lingkungannya juga berperan dalam menunjukkan sikap keteladanan dirinya menjadi peserta KB yang aktif dan mandiri. Tokoh agama dan tokoh masyarakat agar menerima dan melaksanakan KB

dengan baik” (wawancara : Dra. Ning Iriani Indarwati, KaSubBag Umum dan Humas, 4 januari 2012).

2) Pelajar dan Mahasiswa

BKKBN bekerja sama dengan Pelajar dan Mahasiswa dalam mensosialisasikan Program KB dan Reproduksi Remaja. Pelajar dan Mahasiswa ini berada dalam naungan PIK-RR dan GenRe. “Melalui program GenRe dan PIK-RR (Generasi Terencana) kami ingin memberi pemahaman kepada remaja untuk menunda usia perkawinan. Saat ini usia perkawinan pertama bagi perempuan masih rendah sekitar 19 tahun. Dengan menunda usia perkawinan sangat berpengaruh pada penurunan angka fertilitas” (wawancara : Dra. Ning Iriani Indarwati, KaSubBag Umum dan Humas, 4 januari 2012)

3) Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan revitalisasi program kependudukan dan KB, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) gandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Kerena dua organisasi profesi tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program KB di lapangan.

Untuk menjadi seorang komunikator dalam penyampaian program dari BKKBN, seorang komunikator harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :

1) Mengerti dan mengetahui program-program BKKBN;

BKKBN melakukan pendidikan dan latihan kepada mereka agar memiliki pengetahuan lebih tentang program Keluarga Berencana tersebut.

2) Bisa berkomunikasi dengan efektif;

Kemampuan berkomunikasi dengan baik merupakan hal utama dalam proses penyampaian pesan kepada khalayak.

3) Berpandangan kedepan dan mempunyai visi dan misi

Memiliki sikap berpandangan kedepan dan mempunyai visi dan misi sangat penting untuk dimiliki oleh seorang komunikator agar dalam penyampaian pesan seorang komunikator lebih semangat dan benar-benar ingin mensukseskan Program Keluarga Berencana.

4) Mampu bekerja sama dengan media massa

Pejabat humas harus mampu membangun sinergi dan relasi yang baik dengan media massa sebagai suatu kelompok strategis yang berperan penting dalam mensosialisasikan program KB.

2. Pesan

Strategi penyampaian pesan yang dilakukan BKKBN dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat Propinsi Riau yakni tatap muka langsung dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dengan bersama-sama unsur-unsur dari masyarakat, BKKBN

mulai memberikan pemahaman tentang program BKKBN termasuk juga maksud dan tujuannya. Yang mana kiranya sosialisasi tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dan dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Program Keluarga Berencana. Pesan-pesan yang biasa disampaikan BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana adalah sebagai berikut (wawancara : Ahmad Suspandi, Staf Humas, 4 januari 2012) :

a) Kesehatan Reproduksi Remaja

Sosialisasi kesehatan reproduksi ditujukan untuk siapa saja namun dalam hal ini promosi kesehatan ditujukan kepada para remaja, hal ini dikarenakan remaja merupakan masa-masa rentan yang masih mudah terpengaruh segala sesuatu yang baru. Dalam promosi kesehatan terhadap remaja lebih ditekankan kepada pencegahan atas permasalahan yang dihadapi remaja.

b) Keluarga Berencana

Sosialisasi Keluarga Berencana lebih ditujukan kepada Pasangan Usia Subur dengan cara mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi agar lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk terutama ibu dan anak dan menghambat terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk.

Adapun tujuan yang ingin dicapai BKKBN dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat Propinsi Riau adalah :

- a. Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa;

- b. Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa;
- c. Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

3. Media

a) Media Langsung

Seminar dan penyuluhan merupakan salah satu cara yang dilakukan Humas BKKBN dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana. Seminar dan penyuluhan sangat efektif dalam proses menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena saat seminar dan penyuluhan komunikator bertemu dan bertatap muka dan berinteraksi secara langsung kepada komunikan. Dalam seminar dan penyuluhan komunikator dapat menyampaikan pesan dan mempraktekkan tentang pesan dan tujuan dari program KB kepada komunikan. Hal ini bertujuan agar komunikan lebih mudah memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator.

b) Media Massa

Untuk menjangkau masyarakat yang sulit di jangkau oleh komunikan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau menjalin hubungan atau kerjasama dengan media, baik media cetak maupun elektronik. Tujuannya adalah agar masyarakat yang sulit di jangkau oleh komunikator lebih mengetahui tentang arti KB, manfaat KB, penggunaan dan

pemilihan alat kontrasepsi yang cocok, sehingga pencapaian target BKKBN setiap bulan terus meningkat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Donni Irawan K. BA. Kabid Advokasi dan KIE BKKBN Provinsi Riau mengatakan bahwa BKKBN Provinsi Riau memang sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak media massa dalam membantu mensosialisasikan program-program BKKBN terutama program KB, mengingat masyarakat modern saat ini sudah tidak terlalu peduli kepada program pemerintah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan media massa sebagai alat penyampai informasi (wawancara, , Donni Irawan K. BA, Kabid Advokasi dan KIE, 4 januari 2012),.

Kerjasama dilakukan dengan berbagai media massa, yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak berupa koran dan majalah, sedangkan media elektronik berupa radio, televisi dan internet. Banyak media cetak yang bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Riau, hampir semua media cetak, mulai dari Riau Pos, Tribun, Haluan Riau, dan Surat kabar daerah lainnya. Sedangkan radio, BKKBN Provinsi Riau bekerjasama dengan RRI Pekanbaru dan kerjasama dengan televisi yaitu TVRI dan RTV (wawancara : Donni Irawan K. BA, Kabid Advokasi dan KIE, 4 januari 2012).

Untuk terjalin relasi yang erat dan kerjasama yang baik, maka BKKBN membentuk suatu forum yang diberi nama Ikatan Penulis Keluarga Berencana. Hampir semua media massa bergabung dalam forum ini. Forum ini bertujuan untuk menampilkan tulisan-tulisan dan tayangan yang berkualitas dalam membantu mensosialisasikan Program Keluarga Berencana.

c) Media Tidak Langsung

Selain seminar dan media massa BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana juga menggunakan media tidak langsung guna meningkatkan proses sosialisasi kepada masyarakat. Media tidak langsung tersebut dapat berupa papan reklame, spanduk, dan brosur. Papan reklame dan spanduk tentang sosialisasi program KB di letakkan di jalan-jalan yang sering di lewati masyarakat. Sedangkan brosur di gunakan oleh BKKBN sebagai penunjang saat BKKBN mengadakan seminar dan penyuluhan kepada masyarakat

4. Komunikasi

Yang menjadi sasaran utama BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Propinsi Riau adalah (wawancara : Dra. Ning Iriani Indarwati, KaSubBag Umum dan Humas, 4 januari 2012) :

a) Pemaja dan Mahasiswa

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membidik siswa SMA dan mahasiswa sebagai sasaran penggarapan program pengaturan usia perkawinan. Melalui program GenRe (Generasi Terencana) BKKBN ingin memberi pemahaman kepada remaja untuk menunda usia perkawinan. Saat ini usia perkawinan pertama bagi perempuan masih rendah sekitar 19 tahun. Dengan menunda usia perkawinan sangat berpengaruh pada penurunan angka fertilitas.

b) Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur berkisar pada usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya telah berfungsi dengan baik.

5. Umpam Balik

Untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, humas BKKBN juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan masukan dan kritikan sebagai wujud partisipasi masyarakat dengan tujuan terjadinya hubungan kemitraan antara BKKBN dengan masyarakat. Dalam menampung inspirasi dari masyarakat, kritikan dan saran tersebut dapat disampaikan dengan cara (wawancara : Dra. Ning Iriani Indarwati, 4 januari 2012):

a) Datang langsung ke BKKBN Provinsi Riau ;

Masyarakat yang ingin menyampaikan saran dan masukan yang guna nya membangun dan demi kelancaran proses sosialisasi yang dilakukan oleh BKKBN, dapat menyampaikan saran dan masukannya dengan datang langsung ke kantor BKKBN yang ada di jalan Terubuk nomor 1 pekanbaru. Setelah menerima kritikan dan saran dari masyarakat, humas dan seluruh staf BKKBN akan membahas dan mendiskusikannya dalam rapat internal BKKBN. Kemudiaan mengkoordinasikannya kepada seluruh anggota BKKBN propinsi maupun daerah.

b) Forum tanya jawab saat BKKBN mengadakan seminar atau diskusi.

BKKBN juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan sarannya pada saat BKKBN mengadakan seminar atau diskusi. Hal ini bertujuan agar masyarakat langsung mendapatkan jawaban atas pertanyaan atau kritik dan saran mereka.

BAB IV

ANALISIS DATA

Dalam BAB ini akan diuraikan analisis data tentang Strategi humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau dan faktor-faktor penghambat dan pendukung Strategi humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau. Memaparkan dan membahasnya secara deskriptif kualitatif, maka data-data yang didapat akan mampu menjawab pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah.

A. Strategi humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Provinsi Riau

Keberadaan humas pada suatu lembaga merupakan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat ataupun kepada anggota itu sendiri. Dalam mengatur strategi menjalankan fungsi kepada masyarakat ataupun kepada perusahaan secara tidak langsung dapat meningkatkan, mengembangkan lembaga itu sendiri.

Humas sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan publiknya, haruslah menyadari fungsi dan peranannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu tugas yang diemban oleh praktisi Humas adalah menjalin hubungan baik antara organisasi dengan publik eksternal dan internal agar tujuan program yang diharapkan tercapai semaksimal mungkin.

Secara garis besar humas mempunyai peran ganda, yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan

kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan fungsi kedalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama (Rosady, 2006 : 342).

Pada umumnya tugas dan fungsi pokok dari pihak humas BKKBN yakni :

- a. Memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam rangka mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk ikut serta dalam Program Keluarga Berencana.
- b. Komunikator sekaligus mediator dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana
- c. Mendokumentasikan kegiatan BKKBN

Kegiatan humas dimaksudkan untuk menciptakan suatu pengertian, sikap, dan tanggapan yang lebih baik dari khalayak terhadap hal yang akan disampaikan dan diharapkan terciptanya pengertian timbal balik melalui proses yang persuasif.

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

Humas merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh kepercayaan, pengertian dan penghargaan dari publik kepada badan atau lembaga.

Dan didalam humas itu sendiri terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau lembaga kepada publiknya, usaha untuk menanamkan atau memberikan kesan yang menyenangkan dengan memberikan penjelasan atau keterangan kepada publik dengan jujur, sehingga publik merasa menerima informasi dan ikut serta dalam usaha yang direncanakan (Oemi, 2001 : 26)

Upaya yang dilakukan humas BKKBN dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program KB adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara persuasif. Artinya adalah bahwa BKKBN harus lebih aktif dalam mensosialisasikan program dengan melibatkan masyarakat secara langsung dengan cara mengadakan suatu *event* dengan memberdayakan para tokoh setempat yang berpengaruh.

Menurut Edward L. Bernays menyatakan bahwa humas memiliki dua fungsi utama, yaitu (Rosady, 2003 : 191) :

- a. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perubahan masyarakat secara langsung.
- b. Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Fungsi pendekatan public relations mempunyai strategi diantaranya adalah (Rosady, 2005 : 133-134) :

- a. Strategi operasional melalui pelaksanaan *public relations* yang digunakan dengan pendekatan kemasyarakatan, melalui mekanisme dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dari opini publik atau kehendak masyarakat terekam

pada setiap berita atau surat pembaca dan lain sebagainya yang dimuat diberbagai media. Artinya pihak humas mutlak bersikap atau berkemampuan untuk mendengar mengenai aspirasi yang ada didalam masyarakat, baik mengenai etika, moral, maupun nilai-nilai yang dianut didalam masyarakat.

- b. Pendekatan persuasif dan edukatif, fungsi humas adalah menciptakan komuniksi dua arah (timbal balik) dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada pihak publik yang bersifat mendidik dan memberikan penerangan, maupun dengan melakukan pendekatan persuasif, agar tercipta saling pengertian, menghargai, toleransi dan sebagainya.
- c. Pendekatan tanggung jawab sosial, humas menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial bahwa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tersebut bukan ditujukan untuk mengambil keuntungan sepihak dari publik sasarannya (masyarakat), namun untuk memperoleh keuntungan bersama.
- d. Pendekatan kerja sama, berupaya berhubungan yang harmonis antara organsasi dengan berbagai kalangan baik hubungan kedalam maupun hubungan keluar untuk meningkatkan kerjasama.
- e. Pendekatan koordinatif, untuk memperluas peranan humas dimasyarakat.

Strategi pendekatan dalam program keluarga berencana antara lain :

- a. Pendekatan kemasyarakatan (community approach).
Diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat (kepedulian) yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- b. Pendekatan koordinasi aktif (active coordinative approach)

Mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergik dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar.

c. Pendekatan integrative (integrative approach)

Memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak.

d. Pendekatan kualitas (quality approach)

Meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan (provider) dan penerima pelayanan (klien) sesuai dengan situasi dan kondisi.

e. Pendekatan kemandirian (self reliant approach)

Memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program KB nasional.

Agar hasil yang ingin di capai oleh BKKBN lebih maksimal, BKKBN melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
 - 1) Setiap desa/kelurahan memiliki Toga/Toma yang melakukan advokasi dan komunikasi informasi edukasi (KIE) KB
 - 2) Setiap desa/kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa

- 3) Seluruh desa/kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapat pelayanan KB bermutu
 - 4) Setiap kecamatan memiliki Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang aktif
 - 5) Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi
- b. Menata kembali Pengelolaan Program KB
- 1) Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas
 - 2) BKKBN menerapkan sistem informasi yang up-to date
 - 3) Setiap BKKBN provinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya
 - 4) Pengelolaan Program KB di setiap provinsi mendapat fasilitasi, advokasi dan supervisi dari BKKBN pusat
 - 5) Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja
 - 6) Setiap kabupaten/kota memiliki dinas KB yang dikukuhkan Perda
- c. Memperkuat SDM Operasional Program
- 1) Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih
 - 2) Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB
 - 3) Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai
- d. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB

- 1) Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 2) Seluruh keluarga pra sejahtera dan sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif
 - 3) Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR)
 - 4) Setiap kabupaten/kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga (BLK)
- e. Meningkatkan Pembiayaan Program KB
- 1) Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah
 - 2) Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
 - 3) Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau

Untuk saat ini, bentuk informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa himbauan untuk dapat mensukseskan program tersebut dengan menjelaskan manfaat dari program itu sendiri.. Dengan paham dan sadarnya masyarakat akan pentingnya ber-KB diharapkan mereka ikut berpartisipasi mensukseskan program tersebut. Perencanaan strategi dalam humas merupakan perbuatan keputusan tentang tujuan dan sasaran program, mengidentifikasi publik kunci, menentukan kebijakan atau aturan untuk memadukan pemilihan strategi, dan menentukan strategi. Harus ada kaitan antara tujuan program

keseluruhan, sasaran yang ditentukan untuk masing-masing publik dan strategi yang dipilih. Poin utamanya adalah bahwa strategi yang dipilih untuk mencapai hasil tertentu.

Adanya partisipasi yang baik masyarakat dalam pelaksanakan program KB ditunjukkan oleh meningkatnya konsumsi alat kontrasepsi yang dikelurkan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hal ini tidak lepas dari peran Humas BKKBN Provinsi Riau sebagai komunikator, mediator/penghubung untuk membantu pihak manajemen organisasi mendengarkan keinginan dan harapan dari masyarakat.

Strategi penyampaian pesan yang dilakukan BKKBN dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat Propinsi Riau yakni tatap muka langsung dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dengan bersama-sama unsur-unsur dari masyarakat, BKKBN mulai memberikan pemahaman tentang program BKKBN termasuk juga maksud dan tujuannya. Disamping itu badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau menjalin hubungan atau kerjasama dengan media, baik media cetak maupun elektronik dalam rangka mensosialisasikan program KB. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih mengetahui tentang arti KB, manfaat KB, penggunaan dan pemilihan alat kontrasepsi yang cocok, sehingga pencapaian target BKKBN setiap bulan terus meningkat.

Hubungan media dan pers merupakan sebagai alat pendukung atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan publik.

Dikarenakan salah satu fungsi pers adalah kekuatan pembentuk opini yang sangat efektif melalui media massa (Rosady, 2006 ; 167).

Untuk itu, humas BKKBN menjalin kerjasama yang baik dengan media massa yang ada, salah satu nya adalah dengan mengadakan pembinaan terhadap media-media massa pilihan. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas wartawan yang datang keruangan humas dari berbagai media massa dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media. Hal ini dilakukan oleh Humas BKKBN karena media massa merupakan saluran penyampaian pesan yang dapat mencapai jumlah massa yang besar dan heterogen serta lebih cepat.

Kerja sama dengan pers akan menghasilkan frekuensi publisitas yang cukup tinggi, dampak nya publik dapat mengetahui informasi dalam waku yang singkat dan cakupan wilayah yang luas.

BKKBN Provinsi Riau memang sangat membutuhkan kerjasama dengan pihak media massa dalam membantu mensosialisasikan program-program BKKBN terutama program KB, karena media massa merupakan saluran penyampaian pesan yang dapat mencapai jumlah massa yang besar dan heterogen serta lebih cepat. Kerjasama dilakukan dengan berbagai media massa, yaitu media cetak dan elektronik. Media cetak berupa koran, pamflet, spanduk dan media elektronik berupa radio, televisi dan internet. Banyak media cetak yang bekerja sama dengan BKKBN Provinsi Riau, hampir semua media cetak, mulai dari Riau Pos, Tribun, Haluan Riau, dan Surat kabar daerah lainnya. Sedangkan radio,

BKKBN Provinsi Riau bekerjasama dengan RRI Pekanbaru dan kerjasama dengan televisi yaitu TVRI dan RTV.

Kemudian pihak humas BKKBN Provinsi Riau juga melakukan upaya-upaya atau strategi yang disampaikan kepada publik bersifat tulisan seperti pamflet, spanduk dan slogan-slogan yang berhubungan dengan program Keluarga Berencana.

Kerja sama dengan pers akan menghasilkan frekuensi publisitas yang cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut baik yang bersifat *stimuttaneity effect* (efek keserempakan, efek dramatisir, atau publisitas tinggi, dan memiliki pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap pembentukan opini publik dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehubungan dengan jumlah pembaca yang tersebar di berbagai tempat, kawasan dalam waktu bersamaan.

Hal ini dilakukan Humas BKKBN Provinsi Riau dalam rangka mem sosialisasikan Program Keluarga Berencana agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan ber-KB yang ada dan pada akhirnya masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan-masukan dan kritikan terhadap sosialisasi Program KB tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Humas BKKBN Provinsi Riau, dapat disimpulkan bahwa Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana tidak bekerja dengan sendirinya, humas memerlukan peran komunikator baik dari pihak internal maupun eksternal agar mempermudah dalam proses mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau, selain itu humas juga bekerja sama dengan pihak media massa, baik media cetak maupun media elektronik agar sosialisasi program keluarga berencana tersebar secara merata ke seluruh masyarakat Provinsi Riau.

Dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau, Humas BKKBN beserta komunikator Internal maupun eksternal melakukannya secara persuasif, sehingga masyarakat ikut serta dan berperan aktif dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana yang dilakukan BKKBN Provinsi Riau.

Aktivitas Humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Humas BKKBN Provinsi Riau mengkoordinasi komunikator internal maupun eksternal agar sosialisasi program KB tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam mensukseskan Program Keluarga berencana
3. Humas BKKBN Provinsi Riau menjalin hubungan baik dan bekerkasama dengan pihak media.

B. Saran

1. BKKBN Provinsi Riau harus sering memberikan pelatihan berkala kepada komunikator, terutama komunikator non formal, agar mereka lebih memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Program KB.
2. Pemerintah Provinsi Riau harus menganggarkan dana lebih kepada BKKBN Provinsi Riau, agar BKKBN lebih lancar dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat provinsi Riau.
3. Kerjasama dengan pihak media hendaknya lebih ditingkatkan, karna dengan adanya kerjasama dengan media akan memperlancar pencapaian suatu program.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedy mulyana, “*Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*”, Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Hadari Nawawi, “*Metode Penelitian Sosial*”, PT Gajah Mada Universiti Pers, 1993
- Jefkins, Frank, ”*Public relations edisi kelima*”, Jakarta: Erlangga.2003
- Linggar Anggoro ,”*Teori dan Profesi Kehumasan*”, Jakarta: Bumi Aksara.2005
- Onong Uchjana, “*Dinamika Komunikasi*” Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992
- Rosady Ruslan,”*Manajemen Public relation dan media komunikasi*”, Jakarta : Rajawali pers,2008
- Rosady Ruslan, “*Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi*”, Jakarta :Grafindo Persada, 1993
- Rosady Ruslan,”*Metode Penelitian,Public Relations dan Komunikasi*”, Jakarta : Rajawali pers,2003
- Soleh Soemirat, Dasar-dasar Public Relations, Remaja Rosada Karya, Bandung 2004
- Sondang Siagian P, “*Manajemen Stratejik*”, bandung : Bumi Aksara, 1995
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2006
- Widjaja, *Pengantar ilmu komunikasi*, , Rieneka Cipta, Jakarta : 1992
- www.bkkbn.com download 14-07-2011, 18:14
- www.ceria.bkkbn.go.id download 14-07-2011, 18:12
- <http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/> download 14-07-2011, 18:09